



Bentangan

Jelang Putusan: Tak Cukup Sudarso dan Andi Putra KPK Mesti Tersangkakan Frank Wijaya dan M Syahrir

A. Pendahuluan

Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menuntut General Manager PT Adimulia Agrolestari (AA) Sudarso 3 tahun penjara dan pidana denda Rp 200 juta subsidier 4 bulan kurungan.

Sudarso menyuap Bupati Kuantan Singingi Andi Putra, untuk mendapatkan surat rekomendasi persetujuan penempatan kebun plasma di Kabupaten Kampar. Sekaligus menyatakan tidak perlu lagi membangun kebun kemitraan masyarakat itu di Kuansing.

Sudarso baru menyerahkan Rp 500 juta dari Rp 1,5 miliar yang diminta Andi Putra. Ketika hendak menyerahkan Rp 250 juta lagi, tim KPK justru menangkapnya usai bertemu Andi di rumah dinas bupati, 18 Oktober 2021.

Sudarso juga menyuap Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Riau Muhammad Syahrir sebesar Rp 1,2 miliar. Uang diserahkan langsung di rumah dinas Syahrir dalam mata uang Dolar Singapura, sebelum berkas perpanjangan HGU diajukan.

Selain Andi dan Syahrir, Sudarso juga bagi-bagi duit ke sejumlah pegawai di Kanwil BPN Riau, Sekretariat Daerah Kuansing hingga beberapa kepala desa yang meminta perusahaannya membangun kebun plasma. Bahkan Kepala Dinas Perkebunan Zulfadli dan Kabid Sri Ambar Kusumawati juga kecipratan.

Sudarso berbuat atas perintah Frank Wijaya, pemilik AA. Frank memang menyuruhnya mengurus perpanjangan HGU perusahaan karena dinilai paling dekat dengan bupati dan orang-orang di kantor pertanahan. Tiap uang suap yang keluar dari rekening perusahaan juga atas persetujuannya.

Luas HGU AA di Kampar 3.952 hektare dan 2.533 hektare di Kuansing yang berlaku sejak 1994. Keduanya akan berakhir pada 2024. Salah satu syarat perpanjangan HGU, AA mesti bersedia bangun kebun plasma 20 persen dari luas konsesi. Selama ini, AA baru fasilitasi bangun kebun masyarakat di Kampar.

Saat rapat ekspos Panitia B, Sudarso menolak kewajiban itu karena menganggap kebun plasma di Kampar sudah cukup. Kecuali, pemerintah menyediakan lahannya. Dia, juga merasa benar karena ada surat Dinas Perkebunan Riau, menyatakan AA telah bangun 21 persen kebun plasma dari total luas Izin Usaha Perkebunan (IUP).

Syahrir, pun memerintahnya minta rekomendasi persetujuan kebun plasma di Kampar itu ke Andi Putra. Padahal, kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sudah jelas dalam Permen ATR BPN 7/2017. Untuk dapat sepucuk surat itulah, Sudarso menyuap Andi Putra dan akhirnya kena operasi tangkap tangan (OTT) KPK.



Sidang perkara Sudarso pertama kali digelar Kamis 13 Januari 2022. Sidang berlangsung satu kali dalam satu minggu. Sampai tuntutan, Kamis 10 Maret, sidang telah berjalan delapan kali. Penuntut umum menghadirkan 23 saksi plus keterangan Sudarso sendiri. Tak ada saksi meringankan.

Berikut nukilan hasil pantauan *Senarai*.

B. Profil Terdakwa

Nama lengkap	: Sudarso
Tempat	: Kisaran, Kabupaten Asahan
Umur/tanggal lahir	: 56 tahun/27 Juli 1965
Kebangsaan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Jl. Kartama Gg Nurmalis No 2 RT 002 RW 021 Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru
Pekerjaan	: General Manager PT Adimulia Agrolestari
Pendidikan terakhir	: SMA

C. Majelis Hakim

1. Dahlan (ketua)
2. Iwan Irawan (anggota)
3. Adrian Hasiholan Bogawijn Hutagalung (anggota)

D. Penuntut Umum

1. Wahyu Dwi Oktafianto
2. Rio Frandy
3. Yoga Pratomo
4. Riniyati Karnasih
5. Meyer V. Simanjuntak
6. Ariawan Agustiartono
7. Lie Putra Setiawan

E. Penasihat Hukum

1. Refman Basri
2. Chairul Fahru Siregar
3. Rahmat

F. Dakwaan

Penuntut umum menerapkan dakwaan alternatif.

Kesatu: Pasal 5 Ayat 1 huruf a UU 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP



Pasal 5 Ayat 1 huruf a: dipidana dengan pidana penjara **paling singkat 1 (satu) tahun** dan **paling lama 5 (lima) tahun** dan atau pidana **denda paling sedikit Rp 50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) dan **paling banyak Rp 250.000.000,00** (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya

Pasal 64 Ayat 1 KUHP: jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Atau

Kedua: Pasal 13 UU 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP

Pasal 13: setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara **paling lama 3 (tiga) tahun** dan atau denda **paling banyak 150.000.000,00** (seratus lima puluh juta rupiah).

G. Kesaksian

No	Nama	Pekerjaan	Kesaksian
1	Ibrahim Dasuki	Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran BPN Kuansing	Mengetahui bahwa PT AA sedang bermohon perpanjangan HGU kebun Kuansing, sebab lahan lebih 250 hektar. Permohonan diteruskan ke Kantor BPN Riau. Saat rapat ekspos, Adimulya yang berkeras tidak mau bangun kebun plasma di Kuansing maka diarahkan untuk meminta rekomendasi dari Andi Putra. Saat ekspos dapat Rp 3 juta dari Sudarso sebagai uang transportasi. Link : https://senarai.or.id/pantau/sudarso-bagi-bagi-uang-untuk-perpanjangan-hgu-adimulia-agrolestari/ Video : https://www.youtube.com/watch?v=k-6wr4sIXx4&list=PLo6DA9PnQYwIT5Hie7FmyuY_Ls6SU6Pyn&index=2
2	Sutrilwan	Kabag TU BPN Kanwil Riau	Sewaktu jabat Kepala BPN Kampar, Sudarso menayakan SPKT dan ditemukan bahwa HGU sudah terbagi 2 wilayah. Ia mengarahkan supaya HGU dipecah pada Kanwil Riau. Terima Rp 75 juta dalih untuk biaya renovasi kantor. Link : https://senarai.or.id/pantau/sudarso-bagi-bagi-uang-untuk-perpanjangan-hgu-adimulia-agrolestari/ Video : https://www.youtube.com/watch?v=k-6wr4sIXx4&list=PLo6DA9PnQYwIT5Hie7FmyuY_Ls6SU6Pyn&index=2

			ex=2
3	Agus Mandar	Plt Sekda Kuansing	Diperintah Andi Putra untuk hadir ekspos. Ia catat, jika HGU ingin diperpanjang Adimulya harus membangun plasma 20%, uatamakan tengaa kerja _lokal dan menjalankan CSR. Ketika makan siang, Sudarso masukkan amplop isi uang ke sakunya. Link : https://senarai.or.id/pantau/sudarso-bagi-bagi-uang-untuk-perpanjangan-hgu-adimulia-agrolestari/ Video : https://www.youtube.com/watch?v=k-6wr4sIXx4&list=Plo6DA9PnQYwIT5Hie7FmyuY_Ls6SU6Pyn&index=2
4	Andri Meriki	Staff Umum Bupati Kuansing	14 Oktober 2021, Andi Putra memintanya pelajari surat permintaan rekomendasi dari AA. Dan dikomunikasikan kepada Mardiansyah. Link : https://senarai.or.id/pantau/sudarso-bagi-bagi-uang-untuk-perpanjangan-hgu-adimulia-agrolestari/ Video : https://www.youtube.com/watch?v=k-6wr4sIXx4&list=Plo6DA9PnQYwIT5Hie7FmyuY_Ls6SU6Pyn&index=2
5	Mardiansyah	Kepala Dinas PMPTSPTK Kuansing	Dikarenakan ada permintaan rekomendasi dari AA, ia konsultasi dengan Plt Kantor BPN Kuansing. Ketika ingin sampaikan hasil konsultasi, ternyata Andi Putra terkena operasi tangkap tangan. Link : https://senarai.or.id/pantau/sudarso-bagi-bagi-uang-untuk-perpanjangan-hgu-adimulia-agrolestari/ Video : https://www.youtube.com/watch?v=k-6wr4sIXx4&list=Plo6DA9PnQYwIT5Hie7FmyuY_Ls6SU6Pyn&index=2
6	Indrie Kartika Dewi	Fungsional Penata Pertanahan BPN Riau	Adimulya masukkan permohonan perpanjangan HGU 4 Agustus 2021, sebulan kemudian diadakan ekspos di Hotel Prime Park, Pekanbaru. Hasil pertemuan, AA harus meminta rekomendasi ke Bupati Kuansing padahal 5 desa disana minta harus bangun plasma. Terima Rp 40 juta dari Fahmi, staff Sudarso, untuk bayar hotel ekspos, untuk kepentingan pribadi dan dibagi ke staffnya. Link : https://senarai.or.id/pantau/semua-anak-buah-akui-terima-uang-kakanwil-bpn-riau-mengelak-dan-bilang-fitnah/ Video : https://www.youtube.com/watch?v=qxzvVulb6II&list=Plo6DA9PnQYwIT5Hie7FmyuY_Ls6SU6Pyn&index=4 https://www.youtube.com/watch?v=_c6AWOU3KMU&list=Plo6DA9PnQYwIT5Hie7FmyuY_Ls6SU6Pyn&index=3
7	Dwi Handaka	Kabid Survei dan Pemetaan BPN Riau	Setelah ekspos rencananya ia turun untuk pemetaan lokasi permohonan perpanjangan HGU. Terima dari Sudarso Rp 120 juta. Link : https://senarai.or.id/pantau/semua-anak-buah-akui-terima-uang-kakanwil-bpn-riau-mengelak-dan-bilang-fitnah/ Video : https://www.youtube.com/watch?v=qxzvVulb6II&list=Plo6DA9PnQYwIT5Hie7FmyuY_Ls6SU6Pyn&index=3

			nQYwIT5Hie7FmyuY_Ls6SU6Pyn&index=4 https://www.youtube.com/watch?v=_c6AWOU3KMU&list=Plo6DAgPnQYwIT5Hie7FmyuY_Ls6SU6Pyn&index=3
8	Umar Fathoni	Kabid Penetapan Hak dan Pendaftaran BPN Riau	<p>Terima Rp 15 juta dari Sudarso. Setelah ekspos rencananya ia turun untuk pemetaan lokasi permohonan perpanjangan HGU.</p> <p>Link : https://senarai.or.id/pantau/semua-anak-buah-akui-terima- uang-kakanwil-bpn-riau-mengelak-dan-bilang-fitnah/ Video : https://www.youtube.com/watch?v=qxzvVulb6II&list=Plo6DAgPnQYwIT5Hie7FmyuY_Ls6SU6Pyn&index=4 https://www.youtube.com/watch?v=_c6AWOU3KMU&list=Plo6DAgPnQYwIT5Hie7FmyuY_Ls6SU6Pyn&index=3</p>
9	Muhammad Syahrir	Kanwil BPN Riau	<p>Ia rekomendasikan permintaan persetujuan kebun plasma kepada Andi Putra sebab adanya surat dari Dinas Perkebunan Riau tentang kebun plasma sudah ada di Kampar. Sudarso sebut, Syahrir meminta Rp 3,5 Miliar, namun dicilil, untuk awal Frank Wijaya setuju Rp 1,2 Miliar dahulu. Syahrir sebut itu fitnah.</p> <p>Link : https://senarai.or.id/pantau/semua-anak-buah-akui-terima- uang-kakanwil-bpn-riau-mengelak-dan-bilang-fitnah/ Video : https://www.youtube.com/watch?v=qxzvVulb6II&list=Plo6DAgPnQYwIT5Hie7FmyuY_Ls6SU6Pyn&index=4 https://www.youtube.com/watch?v=_c6AWOU3KMU&list=Plo6DAgPnQYwIT5Hie7FmyuY_Ls6SU6Pyn&index=3</p>
10	Zulfadli	Kepala Dinas Perkebunan	<p>2019 Dinas Perkebunan keluaran surat pemberitahuan pembangunan kebun plasma PT AA yang berada di Kampar. Hitungan berdasarkan IUP. Usai ekspos terima Rp 10 juta dari Sudarso yang dititip kepada Ambar.</p> <p>Link : https://senarai.or.id/pantau/semua-anak-buah-akui-terima- uang-kakanwil-bpn-riau-mengelak-dan-bilang-fitnah/ Video : https://www.youtube.com/watch?v=_c6AWOU3KMU https://www.youtube.com/watch?v=qxzvVulb6II&list=Plo6DAgPnQYwIT5Hie7FmyuY_Ls6SU6Pyn&index=4</p>
11	Sri Ambar Kusumawati	Kabid Pengembangan Usaha dan Penyuluhan Disbun Riau	<p>Penempatan kebun plasma PT AA di Kamapr cukup dan melebihi batas minimal. Perusahaan tidak perlu bentuk kebun plasma lagi di Kuansing, pensejahteraan masyarakat bisa melalui program CSR. Ia terima 3 juta dari Fahmi atas perintah Sudarso sewaktu ekspos.</p> <p>Link : https://senarai.or.id/pantau/semua-anak-buah-akui-terima- uang-kakanwil-bpn-riau-mengelak-dan-bilang-fitnah/ Video : https://www.youtube.com/watch?v=_c6AWOU3KMU https://www.youtube.com/watch?v=qxzvVulb6II&list=Plo6DAgPnQYwIT5Hie7FmyuY_Ls6SU6Pyn&index=4</p>

12	Mujiono dan Nur Ahmad	Kades Sumber Jaya dan Suka Damai	Mereka setuju dengan perpanjangan HGU PT AA dengan catatan dibangun kebun plasma didesa. Link : https://senarai.or.id/pantau/semua-anak-buah-akui-terima-uang-kakanwil-bpn-riau-mengelak-dan-bilang-fitnah/ Video : https://www.youtube.com/watch?v=_c6AWOU3KMU https://www.youtube.com/watch?v=qxzvVulb6II&list=PLo6DA9PnQYwIT5Hie7FmyuY_Ls6SU6PYn&index=4
13	Syahlevi Andra	Kepala Kantor PT AA Pekanbaru	Sebagai pengantar uang setelah diterima dari Hadi Ngadiman lalu diteruskan kepada Sudarso. Lewat Rudi Ngadiman ia pernah dititipkan uang 140.000 SGD setara Rp 1,6 miliar, Rp 500 juta yang diambil Deli Iswanto, Supir Andi Putra. Dan Rp 250 juta, sampai tangkpa tangan uang masih ditangannya lalu dimasukkan balik ke rekening PT AA. Link : https://senarai.or.id/pantau/saksi-surat-rekomendasi-permintaan-kakanwil-bpn-riau/ Video: https://www.youtube.com/watch?v=IN_k5X5UwwA&list=PLo6DA9PnQYwIT5Hie7FmyuY_Ls6SU6PYn&index=6 https://www.youtube.com/watch?v=VaiDK39lBLM&list=PLo6DA9PnQYwIT5Hie7FmyuY_Ls6SU6PYn&index=7
14	Riana Iskandar	Direktur urusan Pembukaan dan Pajak	Ia berperan sebagai pengirim semua uang yang diperlukan untuk perpanjangan HGU PT AA. Ada 62 transaksi yang sudah dilakukan meliputi; operasional Sudarso, bayar hotel ekspos, pinjaman bupati dan 'pengembalian HGU' sebab uang tidak jadi diberikan kepada Andi Putra. Link : https://senarai.or.id/pantau/saksi-surat-rekomendasi-permintaan-kakanwil-bpn-riau/ Video: https://www.youtube.com/watch?v=IN_k5X5UwwA&list=PLo6DA9PnQYwIT5Hie7FmyuY_Ls6SU6PYn&index=6 https://www.youtube.com/watch?v=VaiDK39lBLM&list=PLo6DA9PnQYwIT5Hie7FmyuY_Ls6SU6PYn&index=7
15	Rudi Ngadiman	Staff PT AA	Berkuasa atas penggunaan rekening PT AA dan PT Surya Agrolika Reksa--SAR. Semua uang yang dipegang Sudarso lewat Syahlevi berasal dari pencairan rekening yang dilakukannya. Dan yang bawa langsung 140.000 SGD langsung dari Medan. Link : https://senarai.or.id/pantau/saksi-surat-rekomendasi-permintaan-kakanwil-bpn-riau/ Video: https://www.youtube.com/watch?v=IN_k5X5UwwA&list=PLo6DA9PnQYwIT5Hie7FmyuY_Ls6SU6PYn&index=6 https://www.youtube.com/watch?v=VaiDK39lBLM&list=PLo6DA9PnQYwIT5Hie7FmyuY_Ls6SU6PYn&index=7
16	David Vence Turangan	Dirut PT AA	Ia yang menandatangani permintaan surat rekomendasi persetujuan kebun plasma Kampar yang dikirim ke Andi Putra. Ia berkeras seharusnya HGU AA yang diminta dialihkan kepada PT SAR, sebab satu grup.

			<p>Link : https://senarai.or.id/pantau/saksi-surat-rekomendasi-permintaan-kakanwil-bpn-riau/ Video: https://www.youtube.com/watch?v=IN_k5X5UwwA&list=PLo6DAgPnQYwIT5Hie7FmyuY_Ls6SU6PYn&index=6 https://www.youtube.com/watch?v=VaiDK39lLM&list=PLo6DAgPnQYwIT5Hie7FmyuY_Ls6SU6PYn&index=7</p>
17	Fahmi Zulfadli	Legal PT AA	<p>Bawahan Sudarso yang mengurus diokumen administrasi dan yang berhadapan dengan pegawai teknis di BPN Riau dan Kuansing, Disbun Riau, DPMPTSP dan BPKH XIX.</p> <p>Link : https://senarai.or.id/pantau/saksi-surat-rekomendasi-permintaan-kakanwil-bpn-riau/ Video: https://www.youtube.com/watch?v=IN_k5X5UwwA&list=PLo6DAgPnQYwIT5Hie7FmyuY_Ls6SU6PYn&index=6 https://www.youtube.com/watch?v=VaiDK39lLM&list=PLo6DAgPnQYwIT5Hie7FmyuY_Ls6SU6PYn&index=7</p>
18	Frank Wijaya	Pemilik PT AA	<p>Untuk pengurusan HGU PT AA sudah habis hampir Rp 10 miliar. Untuk permudah urusan perpanjangan, Kepala Kanwil BPN Riau minta Rp 3,5 miliar, baru disetujui 1,6 Miliar. Untuk mengeluarkan surat persetujuan penempatan kebun plasma, Andi Putra minta Rp 1,5 miliar, tahap awal baru Rp 500 juta. Tahap selanjutnya Rp 250 juta yang harusnya Sudarso ambil, namun sudah terkena tangkap tangan oleh KPK. Dan PT AA sering beri uang ke Andi Putra mulai saat mencalon DPRD dan Bupati Kuansing.</p> <p>Link : https://senarai.or.id/pantau/saksi-surat-rekomendasi-permintaan-kakanwil-bpn-riau/ Video: https://www.youtube.com/watch?v=IN_k5X5UwwA&list=PLo6DAgPnQYwIT5Hie7FmyuY_Ls6SU6PYn&index=6 https://www.youtube.com/watch?v=VaiDK39lLM&list=PLo6DAgPnQYwIT5Hie7FmyuY_Ls6SU6PYn&index=7</p>
19	Paino Haryanto	Senior Manager PT AA	<p>Ia sering temani Sudarso dalam perpanjangan HGU PT AA dan permintaan rekomendasi Andi Putra. Hingga saat tangkap tangan KPK, mereka sedang bersama.</p> <p>Link : https://senarai.or.id/pantau/saksi-surat-rekomendasi-permintaan-kakanwil-bpn-riau/ Video: https://www.youtube.com/watch?v=IN_k5X5UwwA&list=PLo6DAgPnQYwIT5Hie7FmyuY_Ls6SU6PYn&index=6 https://www.youtube.com/watch?v=VaiDK39lLM&list=PLo6DAgPnQYwIT5Hie7FmyuY_Ls6SU6PYn&index=7</p>
20	Deli Iswanto	Supir Andi Putra	<p>Ia rutin temani Andi Putra untuk datang ke rumah Sudarso. 27 September lalu, ia yang diperintah Andi untuk ambil Rp 500 juta disana. Lalu menyimpan di rumah Andri.</p> <p>Link : https://senarai.or.id/pantau/andi-putra-akan-bantu-terbitnya-rekomendasi/</p>

			<p>Video : https://www.youtube.com/watch?v=uBG2uxl3mFA&list=PLo6DAgPnQYwIT5Hie7FmyuY_Ls6SU6PYn&index=8</p>
21	Andri	Pengawas Kebun Andi Putra	<p>la yang menyimpan uang dari Deli Iswanto selama 2 hari. Link : https://senarai.or.id/pantau/andi-putra-akan-bantu-terbitnya-rekomendasi/ Video : https://www.youtube.com/watch?v=uBG2uxl3mFA&list=PLo6DAgPnQYwIT5Hie7FmyuY_Ls6SU6PYn&index=8</p>
22	Hendri Kurniadi	Ajudan Andi Putra	<p>Sebelum kerja mengawal Andi Putra sudah kenal dahulu dengan Sudarso. Ia bersama Andi ketika operasi tangkap tangan 18 Oktober. Link : https://senarai.or.id/pantau/andi-putra-akan-bantu-terbitnya-rekomendasi/ Video : https://www.youtube.com/watch?v=uBG2uxl3mFA&list=PLo6DAgPnQYwIT5Hie7FmyuY_Ls6SU6PYn&index=8</p>
23	Andi Putra	Bupati Kuansing non aktif	<p>Kenal Sudarso sebagai PT SAR dan PT AA dan spesialisasi pengurus masalah kedua kebun. Sudah saling kenal saat menjabat anggota DPRD. 3 September tahu sedang dilakukan ekspos perpanjangan HGU PT AA, ia perintah Agus Mandar kesana. Hari keduanya, datang ke rumah Sudarso alasan minta pinjaman Rp 1,5 Miliar. Dua minggu kemudian, 27 September perintah supirnya datang kesana untuk ambil Rp 500 juta. 12 Oktober Sudarso datang bawa surat pengajuan permintaan persetujuan penempatan kebun plasma AA di Kampar. Enam harinya, 18 Oktober suruh Sudarso ke rumah pribadi, janjikan akan keluar surat persetujuan. Sudarso ke Dinas PMPTSPTK untuk jumpa Mardiansyah dan kena OTT. Andi ke Pekanbaru dan diminta menyerahkan diri ke Polda Riau. Sebelum itu sudah mereset ulang isi gawai dan mematikan kartu telpon. Ia terima uang kampanye dari PT AA saat mencalon DPRD dan Bupati. Link : https://senarai.or.id/pantau/andi-putra-akan-bantu-terbitnya-rekomendasi/ Video : https://www.youtube.com/watch?v=uBG2uxl3mFA&list=PLo6DAgPnQYwIT5Hie7FmyuY_Ls6SU6PYn&index=8</p>
24	Sudarso	Terdakwa	<p>Diperintah Frank Wijaya untuk urus perpanjangan HGU PT AA yang akan berakhir 2024. Hasil ekspos jika HGU PT AA ingin diperpanjang harus urus permintaan persetujuan penempatan kebun plasma PT AA di Kampar. Ia langsung berkomunikasi dengan Andi Putra. Agar surat persetujuan keluar Andi minta Rp 1,5 miliar. Sebelumnya, Ketika baru jabat bupati ada juga minta pinjaman Rp 1,5 miliar namun baru diserahkan kantor Rp 500 juta. Ketika mencalon Bupati serahkan Rp 200 juta dan saat ikut pemilihan DPRD diberi juga Rp 75 juta.</p> <p>Memberikan sejumlah uang kepada Kepala Kanwil BPN Riau dan</p>



			<p>pegawai didalamnya. Rp 1,2 miliar setor untuk Muhammad Syahrir dari permintaan Rp 3,5 miliar. Namun yang diminta ke kantor Rp 1,6 miliar, sisanya dipakai pribadi. Untuk pegawai BPN Riau dipakai bayar keperluan bayar hotel, transportasi ekspos dan dibagi-bagi.</p> <p>Uang diberikan agar HGU bisa diperpanjang. Link : https://senarai.or.id/pantau/sudarso-sering-beri-uang-ke-andi-putra-termasuk-biaya-kampanye/ Video : https://www.youtube.com/watch?v=luG5t3fJ_mo&list=PLo6DA9PnQYwIT5Hie7FmyuY_Ls6SU6PYn&index=9</p>
--	--	--	---

Ibrahim Dasuki, mengatakan permohonan perpanjangan HGU AA diteruskan ke Kanwil BPN Riau karena luas usulan lebih 250 hektare.

Setelah itu, pada 3 September 2021, Ibrahim, mewakili Plt Kantor Pertanahan Kuansing menghadiri ekspos di Hotel Prime Park, Pekanbaru. Rapat dipimpin Kepala Kanwil BPN Riau Muhammad Syahrir.

Salah satu bahasan, kewajiban pembangunan kebun plasma di Kuansing. Tapi AA diperintahkan minta rekomendasi persetujuan kebun plasma di Kampar ke Bupati Kuansing Andi Putra. Ibrahim, lupa dari mana inisiatif tersebut.

Usai rapat, Ibrahim terima uang transportasi Rp 3 juta dari Sudarso. Dia, kembalikan lagi ke rekening KPK setelah diperiksa.

Sutrilwan, menemukan areal HGU AA sudah terbagi dua wilayah. Dia, mengarahkan Sudarso mengurus pemecahan surat HGU ke Kanwil BPN Riau. Setelah itu, dia terima Rp 75 juta dari Sudarso buat tambahan biaya renovasi kantor.

Agus Mandar, mencatat tiga hal penting yang harus dipenuhi AA untuk dapat perpanjangan HGU: pembangunan kebun plasma minimal 20 persen, mengutamakan tenaga kerja lokal dan menjalankan tanggungjawab sosial perusahaan. Dia, juga terima uang Rp 15 juta dari Sudarso usai ekspos.

Andri Meiriki, terima surat permohonan rekomendasi persetujuan plasma di Kampar dari Andi Putra di rumah dinas bupati, 14 Oktober 2021. Andi, memintanya mempelajari surat tersebut.

Pada 18 Oktober, pagi, dia konsultasi ke **Mardiansyah**. Kata Mardiansyah, itu kewenangan BPN. Beberapa setelah perbincangan itu, keduanya dapat kabar penangkapan Andi.

Indrie Kartika Dewi, sekaligus Sekretaris Panitia B, tidak menampik soal rekomendasi persetujuan plasma Kampar dari Bupati Kuansing, karena adanya surat pernyataan kebun plasma 21 persen dari Disbun Riau berdasarkan IUP AA.



Tapi, Indrie tidak mampu menjelaskan dalil atau aturan untuk menguatkan alasannya itu. Padahal dia tahu, AA tetap wajib bangun kebun plasma minimal 20 persen dari luas HGU di Kuansing, berdasarkan Permen ATR BPN 7/2017 dan SE Kanwil BPN Riau Nomor 11.

Indrie, bilang rapat ekspos dibiayai AA sebesar Rp 40 juta. Tapi bayar hotel hanya Rp 13,6 juta. Sisanya dinikmati sendiri dan dibagi-bagi pegawai Kanwil BPN Riau lainnya. Pengakuannya, hanya menggunakan Rp 8 juta. Sekitar Rp 25 juta telah dikembalikan ke rekening KPK.

Dwi Handaka, justru terima uang lebih banyak dari Sudarso. Sejak awal permohonan perpanjangan HGU hingga usai rapat di Prime Park Hotel. Total Rp 120 juta. Dia pakai beberapa kali ke Jakarta buat mengurus peta bidang HGU AA dan untuk keperluan pribadi. Tapi dia beralih tak paham soal kewajiban kebun plasma.

Umar Fathoni, justru punya maksud lain atas rekomendasi yang mesti diperoleh Sudarso dari Andi Putra. Yakni, setuju kebun plasma di Kampar atau tetap membangun lagi di Kuansing.

Sisi lain, Umar mengatakan AA tetap wajib fasilitasi pembangunan kebun masyarakat di Kuansing agar dapat perpanjangan HGU. Umar terima Rp 15 juta dari Sudarso, setelah rapat. Juga telah dikembalikan ke rekening KPK.

M Syahrir, juga tak berkulit ketika Ketua Majelis Dahlan tanya dasar aturan keputusannya memerintahkan Sudarso meminta rekomendasi ke Bupati Andi Putra.

Syahrir tetap cari alasan pembenar. Katanya, rekomendasi itu akan dinilai oleh Kementerian ATR/BPN yang menerbitkan HGU.

Sudarso, sebut telah memberi Rp 1,2 miliar dari Rp 3,5 miliar yang diminta Syahrir, ketika pertama kali konsultasi perpanjangan HGU. Permintaan itu ditulis dalam kertas kuning kecil, saat Sudarso menemuinya di rumah dinas.

Zulfadli, membenarkan pada 2019 telah mengeluarkan surat pemberitahuan pembangunan kebun plasma oleh AA di Kampar. Dia, juga terima Rp 10 juta dari Sudarso, usai mengikuti ekspos.

Sri Ambar Kusumawati, yang mendampingi Zulfadli rapat juga terima Rp 3 juta dari Sudarso. Dia bukan Panitia B, tapi justru menandatangani dukungan perpanjangan HGU AA.

Permohonan pembangunan kebun plasma di Kuansing yang belum dipenuhi AA selama ini, datang dari **Mujiono dan Nur Ahmad**. Keduanya menyampaikan permintaan itu ketika diundang rapat ekspos. Seperti peserta rapat lainnya, mereka juga terima Rp 2,5 juta dari Sudarso.

Syahlevi Andra, membenarkan pemberian suap ke sejumlah orang dalam urusan perpanjangan HGU. Agustus 2021, dia menemani Sudarso mengantar uang 140.000 SGD di sekitaran Kantor Gubernur Riau. Tapi dia tidak lihat langsung penerima uang itu.

Saat rapat ekspos, 3 September 2021, Syahlevi juga tahu pembagian pada seluruh undangan di Prime Park Hotel.



Pada 27 September 2021, Syahlevi antar Rp 500 juta ke kediaman Sudarso. Disana sudah menunggu Deli Iswanto, sopir Andi Putra.

Pagi, 18 Oktober 2021, sebelum OTT KPK, sempat memegang Rp 250 juta untuk diberikan ke Sudarso. Sorenya, Frank Wijaya mengabari Sudarso telah ditangkap dan memerintahkan segera transfer kembali uang itu ke rekening perusahaan.

Riana Iskandar, yang mengurus pembukuan dan pajak, memperkuat fakta pemberian uang selama proses perpanjangan HGU. Dia, mengirim uang perusahaan ke **Rudi Ngadiman alias Koko**, setelah disetujui Frank. Setidaknya ada 62 transaksi dalam urusan ini. Jumlahnya miliaran rupiah.

Rudi, yang juga pemegang kuasa rekening AA dan PT Surya Agrolika Reksa (SAR) di Pekanbaru —satu grup perusahaan— membenarkan fakta tersebut.

David Vence Turangan, mengatakan Muhammad Syahrir lah yang memerintahkan minta rekomendasi Bupati Kuansing supaya HGU diperpanjang. Dia yang tandatangan surat permohonan yang dirancang Sudarso untuk diajukan ke Andi Putra.

Fahmi Zulfadli, mengaku ikut bantu Sudarso mengurus dokumen perpanjangan HGU. Bahkan turut komunikasi dengan Ibrahim Dasuki, Yeyet dan Yeni di Dinas DMPTSP Kuansing, Dedi dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan XIX Pekanbaru, Sri Ambar dan Indrie.

Fahmi, sebut Muhammad Syahrir yang minta surat rekomendasi persetujuan plasma Kampar ke Andi Putra. Dia, juga turut membagikan uang ke kepala desa dan transfer Rp 3 juta ke Ibrahim Dasuki.

Frank Wijaya, sebenarnya mengeluh selama mengurus HGU AA. Sejak 2017 hingga Sudarso kena tangkap perusahaannya sudah mengucurkan uang hampir Rp 10 miliar. Sementara perpanjangan HGU tak kunjung terbit.

Frank, mengikuti perintah Syahrir untuk mendapatkan rekomendasi Andi Putra, karena tidak ingin membangun kebun plasma lagi. Dia, juga mengakui permintaan uang oleh Syahrir yang dibawa Rudi langsung dari Medan dalam bentuk Dolar Singapura. Begitu juga pemberian uang untuk Andi Putra.

Paino Haryanto, saksi terakhir yang menyaksikan berakhirnya kasus suap perpanjangan HGU ini. Sejak awal, dia rutin menemani Sudarso hingga ditangkap dan sempat ditahan KPK sebelum dilepaskan. Informasi penting darinya, Syahrir lah yang meminta agar Sudarso segera dapat rekomendasi Andi Putra.

Proses menyuap Andi Putra, berlangsung melalui sopirnya, **Deli Iswanto**. Deli, mengaku mengambil langsung uang Rp 500 juta ke rumah Sudarso, kemudian menitipkannya ke Andri, pengawas kebun Bupati Kuansing tersebut. Setelah itu, Andi mengambil langsung duit tersebut ke rumahnya.



Ketika OTT, orang yang bersama Andi Putra adalah **Hendri Kurniadi**, ajudannya. Sebelum penangkapan, dia sempat lihat Sudarso masuk rumah Andi bawa tas sandang hitam. Setelah itu, dia bawa Andi ke Pekanbaru dan sempat mampir shalat di Koto Baru.

Di sana, dia mendengar keluhan Andi yang merasa dibuntuti. Dia, pun menelpon Raja Kosmos Parmulais, Polisi di Direktorat Intelijen Keamanan Polda Riau. Selanjutnya, dia memacu kendaraan dengan laju dan sempat mengganti nomor plat mobil.

Tiba di Pekanbaru, istri Andi menelponnya, mengabari bahwa tim KPK sedang dirumahnya dan minta Andi segera ke Polda Riau.

Andi Putra, mengaku kenal lama dengan Sudarso. Dia, tidak menyangkal pernah membahas perpanjangan HGU AA termasuk soal rekomendasi. Keduanya, juga saling berkunjung ke rumah masing-masing. Soal terima uang, dia beralih pinjaman. Dia, juga terima bantuan biaya kampanye dari Sudarso.

Ketika merasa dibuntuti, beberapa jam setelah Sudarso ditangkap, dia mengatur ulang ponsel dan membeli nomor baru. Ketika diminta istrinya datang ke Polda Riau, dia baru sadar saat shalat isya, di sebelahnya ada tim KPK.

Sudarso, sendiri tidak membantah semua keterangan saksi. Dia, sekedar menambahkan beberapa hal. AA siap bangun kebun plasma bila pemerintah sediakan lahan dan usulan rekomendasi bupati muncul setelah rapat ekspos.

Selain itu, dia pernah beri uang Rp 75 juta saat Andi Putra masih duduk di DPRD Kuansing dan biaya kampanye yang dibantunya Rp 200 juta. Soal uang Rp 500 juta, adalah pinjaman Andi sebesar Rp 1,5 miliar. Soal rekomendasi, katanya, Andi minta Rp 1,5 miliar lagi. Ihwal permintaan uang oleh Syahrir, itu ditulis dalam buku kecil berwarna kuning.

H. Temuan dan Analisis

Kasus suap perpanjangan HGU, menunjukkan masih lemahnya pencegahan dan pemberantasan korupsi perizinan sektor sumber daya alam. Baik oleh penegak hukum maupun pemerintah daerah.

1. Terkait perpanjangan HGU

AA memiliki HGU di Kampar 3.952 hektare dan 2.533 hektare di Kuansing. Masa berlakunya akan berakhir pada 2024. Frank Wijaya memerintahkan Sudarso mengurus perpanjangan izin konsesinya itu. Sudarso dianggap berpengalaman dan kenal dengan orang-orang yang berwenang dalam hal ini.

Sudarso membenarkannya. Misal, Andi Putra kerap datang ke kediamannya bahkan hadir dalam resepsi pernikahan anaknya. Begitu juga dengan M Syahrir. Sudarso bisa bertemu langsung di ruangnya bahkan berkunjung ke rumah dinas di luar jam kantor, seperti pada malam hari. Selain itu, juga bisa berkomunikasi langsung melalui telepon seluler.



Kedekatan itu menjadi karpet merah bagi Sudarso untuk mendapatkan persetujuan perpanjangan HGU AA tanpa melewati jalur legal yang telah ditetapkan UU. Adapun persyaratan yang diajukan ke Kanwil BPN Riau sebatas formalitas, karena dia sudah dapat memastikan HGU akan diperpanjang.

Seharusnya penyelenggara negara membatasi diri dari orang-orang yang memiliki kepentingan dengan jabatan atau kewenangannya. Sebab itu akan mempengaruhi keputusan. Apalagi jika penyelenggara negara telah menerima sesuatu berupa hadiah atau janji dari pihak yang memiliki kepentingan itu.

2. Terkait kebun plasma

HGU AA sebenarnya tidak dapat diperpanjang karena perusahaan ini tidak bersedia membangun kebun plasma di Kuansing. Alasannya, kebun kemitraan masyarakat itu sudah dibangun di Kampar. Sementara, kebun masing-masing wilayah itu berbeda izin.

Padahal, Permen ATR/BPN No 7/2017 Pasal 40 Ayat 1 huruf k, menyebut pemegang HGU wajib memfasilitasi pembangunan kebun **masyarakat sekitar** paling sedikit 20 % dari luas tanah yang dimohon HGU dalam bentuk kemitraan (plasma).

Sialnya, M Syahrir yang memahami aturan itu justru melanggar sendiri. Dia, malah memerintah Sudarso minta rekomendasi Andi Putra, supaya setuju kebun plasma cukup di Kampar. Dia juga beralih, Kementerian ATR BPN yang akan menilai akhir rekomendasi itu sebelum terbitkan perpanjangan HGU.

Keputusan M Syahrir, itu tidak terlepas dari pengaruh kedekatannya dengan Sudarso. Andai sejak awal Syahrir dan Sudarso tidak berhubungan apalagi menerima sesuatu di luar haknya, Syahrir pasti akan lebih profesional dan tegas memaksa Sudarso supaya AA memenuhi kewajiban dan tanggungjawab perusahaan terhadap masyarakat.

3. Terkait suap

Selama mengurus perpanjangan HGU, Sudarso menyuap orang-orang yang berhubungan dengan kepentingannya. M Syahrir Rp 1,2 miliar dari Rp 3,5 miliar; Andi Putra Rp 500 juta dari Rp 1,5 miliar; Ibrahim Dasuki Rp 3 juta; Sutrilwan Rp 75 juta; Agus Mandar Rp 15 juta; Indrie Kartika Dewi Rp 40 juta; Dwi Handaka Rp 120 juta; Umar Fathoni 15 juta; Zulfadli Rp 10 juta; Sri Ambar Kusumawati Rp 3 juta; Mujiono dan Nur Ahmad masing-masing Rp 2,5 juta.

Suap itu atas permintaan maupun inisiatif Sudarso sendiri. Misal, M Syahrir, mencatat permintaannya pada selembar kertas kuning kecil. Sedangkan Andi Putra langsung mematok biaya ketika Sudarso menemuinya di rumah dinas. Selain itu, Sudarso juga membiaya operasional pengurusan peta bidang tanah oleh Dwi Handaka hingga ke Jakarta.

Bahkan, Sudarso membiayai rapat ekspos di Prime Park Hotel, Pekanbaru. Agar peserta rapat setuju HGU AA diperpanjang, Sudarso membagi-bagikan uang pada undangan dengan besaran tertentu. Fakta ini menunjukkan, bahwa suap yang dilakukan Sudarso



sudah berlangsung sebelum permohonan diajukan maupun setelah dokumen persyaratan dibahas.

4. Frank Wijaya dan M Syahrir layak tersangka

KPK mestinya juga menetapkan Frank Wijaya dan M Syahrir sebagai tersangka. Frank pemberi perintah dan menyetujui suap yang dilakukan Sudarso. Sebelum menyuap, Sudarso melapor terlebih dahulu padanya. Frank juga yang memerintahkan pencairan uang untuk dibagikan ke sejumlah orang.

Sedangkan M Syahrir, banyak saksi yang mengatakan, dia juga meminta uang pada Sudarso, sebelum AA secara resmi mengajukan permohonan perpanjangan HGU. Sebab, Sudarso terlebih dahulu konsultasi dengannya. Ihwal, konsultasi baik di rumah dinas maupun di ruang kerjanya sendiri tidak dibantah M Syahrir.

Pemberian duit ke M Syahrir dimulai atas persetujuan Frank. Selanjutnya, Rudi Ngadiman membawa uang pecahan Dolar Singapura itu dari Medan ke Pekanbaru. Setelah itu, Syahlevi Andra menemani Sudarso mengantar uang tersebut di sekitaran kompleks gubernuran. Sayangnya, dia tidak melihat penerima uang saat itu. Berdasarkan petunjuk ini, kantor Kanwil BPN Riau memang tidak jauh dari belakang kantor Gubernur Riau.

M Syahrir memang mengatakan itu fitnah. Tapi melihat pengakuan semua anak buahnya di Kanwil BPN Riau yang juga terima duit dari Sudarso, pembelaan itu kurang layak dibenarkan. Apalagi, rapat ekspos di Prime Park Hotel yang dipimpinnya sebagai Ketua Panitia B dibiayai oleh AA.

5. Zulfadli dan Sri Ambar Kusumawati layak diberhentikan

Gubernur Riau Syamsuar sudah seharusnya memberhentikan dua pejabat di Dinas Perkebunan Riau: Zulfadli dan Sri Ambar Kusumawati. Keduanya mengakui terima duit dari Sudarso usai mengikuti rapat ekspos bahas dokumen persyaratan perpanjangan HGU AA.

Gara-gara surat Disbun Riau yang menyatakan AA sudah memiliki 21 persen kebun plasma berdasarkan luas IUP, perusahaan jadi enggan membangun kebun plasma di Kuansing. Padahal kebun plasma yang dimaksud berada di Kampar.

Zulfadli dan Sri Ambar Kusumawati setidaknya melanggar Peraturan Gubernur tentang benturan kepentingan, gratifikasi serta kode etik pegawai di lingkungan Provinsi Riau. Pelanggaran ini juga sekaligus bentuk lemahnya komitmen antikorupsi Syamsuar. Untuk membuktikannya, Syamsuar mesti berani memproses anak buahnya yang nyata korupsi.

I. Temuan lainnya

Penuntut umum tidak terbuka pada publik karena enggan membagikan berkas dakwaan maupun tuntutan yang telah dibacakan dipersidangan. Saat baca tuntutan, publik terutama media massa ketinggalan informasi karena persidangan dimajukan dari jadwal yang



disepakati. Ketika dikonfirmasi, penuntut umum hanya membeberkan pokok tuntutan namun menutup informasi tentang fakta-fakta persidangan yang dijadikan dasar penuntutan.

J. Kesimpulan dan Rekomendasi

Sudarso terbukti bersalah melanggar dakwaan kesatu.

1. Majelis Hakim menghukum Sudarso 5 tahun penjara dan pidana denda Rp 250.000.000;
2. KPK segera menetapkan M Syahrir dan Frank Wijaya tersangka;
3. Gubernur Syamsuar segera menghentikan Zulfadli dan Sri Ambar Kusumawati.